

Analisis Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Produk Domestik Bruto Tahun Lalu Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Nyoman Krishy Raka Putra¹ Ni Made Tisnawati²

Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Udayana, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: krishyraka.kr@gmail.com¹

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Output barang dan jasa tersebut untuk daerah disebut sebagai produk domestik regional bruto (PDRB). Teori Keynes menyatakan pentingnya permintaan agregat dalam menentukan tingkat output, dimana menurut teori ini investasi dan pengeluaran pemerintah adalah modal untuk meningkatkan PDRB. Untuk melihat bagaimana tingkat pertumbuhan nilai pdrb dalam jangka panjang dapat dilihat dengan menggunakan nilai pdrb dari tahun lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan pdrb tahun lalu terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Provinsi Bali menggunakan data sekunder tahun 2013-2023. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dianalisis menggunakan regresi data panel dinamis (autoregresif). Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan investasi, pengeluaran pemerintah, dan pdrb tahun lalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara parsial investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan, investasi dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan, pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan, dan pdrb tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap pdrb kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara parsial investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan, investasi dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan, pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan, dan pdrb tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap pdrb kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan untuk memperhatikan realisasi investasi asing karena tingkat ketimpangannya sangat tinggi, Untuk beberapa daerah mendapati nilai realisasi sebesar Rp0. Selain itu, diharapkan pemerintah untuk lebih peka terhadap potensi dari wilayah masing-masing agar pengeluaran pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kata Kunci: Investasi Asing, Investasi Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerinta, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Abstract

Economic growth is defined as the development of activities in the economy that cause the goods and services produced in society to increase. The output of these goods and services for the regions is referred to as gross regional domestic product (GDP). Keynes' theory states the importance of aggregate demand in determining the level of output, where according to this theory government investment and expenditure are capital to increase GDP. To see how the growth rate of GDP value in the long term can be seen by using the GDP value from last year. This study aims to analyze the influence of investment, government spending, and GDP last year on the gross regional domestic product of districts/cities in Bali Province using secondary data from 2013-2023. Data collection uses observation methods and is analyzed using dynamic panel data regression (autoregressive). The results of this study simultaneously show that investment, government spending, and GDP last year had a positive and significant effect on the gross regional domestic product of districts/cities in Bali Province. Partially, foreign investment has a negative and significant effect, domestic investment has a positive and significant effect, government expenditure has a significant effect, and last year's GDP has a significant effect on the GDP of districts/cities in Bali Province. Partially, foreign investment has a negative and significant effect, domestic investment has a positive and significant effect, government expenditure has a significant effect, and last year's GDP has a significant effect on the GDP of districts/cities in Bali Province.

Regency/city governments in Bali Province are expected to pay attention to the realization of foreign investment because the level of inequality is very high, for some regions there is a realization value of Rp0. In addition, it is hoped that the government will be more sensitive to the potential of their respective regions so that government expenditures can be used properly.

Keyword: Foreign Investment, Domestic Investment, Government Expenditure, Gross Domestic Regional Bruto (GDRP)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai: perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sadono Sukirno, 2000). *Output* barang dan jasa tersebut sering disebut dengan produk domestik bruto (PDB) untuk negara dan untuk daerah disebut sebagai produk domestik regional bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu (Bunyanun Marsus et al., 2020). PDRB menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi neo klasik, pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan suatu daerah diukur dengan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor produksinya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi (Maisaroh & Risyanto, 2018). Teori Keynes juga menekankan pentingnya permintaan agregat dalam menentukan tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini investasi oleh sektor swasta dan pengeluaran pemerintah adalah komponen utama dari permintaan agregat, dimana investasi dan pengeluaran pemerintah merupakan modal untuk meningkatkan *output* (PDRB) suatu daerah. Dalam kondisi di mana permintaan agregat tidak cukup untuk mencapai tingkat output potensial, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Begitu juga, peningkatan investasi dapat mendorong peningkatan produksi dan PDRB (N. Gregory Mankiw, 2003). Hubungan antara investasi dan pengeluaran pemerintah menyebabkan keterkaitan satu dengan yang lain sebagai upaya untuk mewujudkan tingkat PDRB yang tinggi di suatu daerah, kedua faktor tersebut menjadi hal yang difokuskan untuk melihat pertumbuhan nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Investasi secara umum adalah pengorbanan sesuatu untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang (Amalina Maharani & Farhan Saputra, 2021). Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Valencia Putri & Kaylla Manisha, 2021). Investasi merupakan salah satu indikator penting jika berbicara mengenai PDRB di suatu negara maupun di suatu daerah. Provinsi Bali dilihat dari tingkat investasinya baik investasi dalam negeri maupun investasi asing masih mengalami ketimpangan, hal ini dapat dilihat berdasarkan grafik data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2019-2022 berikut.

Tabel 1. Realisasi PMA di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota pada Tahun 2019-2022 (Dalam Juta Rupiah)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	1.395	7.924	-	2.413.195	1.501	-	6.180	1.722	55.661	107.299	158.088
Kab. Tabanan	331.912	645.823	267.294	901.409	129.297	1.143	196.395	94.481	1.066.835	670.349	456.609
Kab. Badung	3.021.220	959.142	3.362.385	107.353	4.899.094	251.581	4.382.400	2.783.261	2.315.029	3.238.136	6.587.903
Kab. Gianyar	95.897	111.853	151.415	-	186.460	6.566	585.735	234.196	618.811	944.099	2.283.607
Kab. Klungkung	4.937	6.231	29.831	150.743	99.656	15.380	87.780	273.871	123.249	164.481	271.954
Kab. Bangli	140	1.284	-	-	-	-	885	1.352	4.411	8.597	45.809
Kab. Karangasem	23.547	60.142	77.609	70.835	170.756	272.339	152.550	120.010	49.639	55.008	283.366
Kab. Buleleng	60.483	3.100.222	1.273.715	207.068	3.429	1.758.680	230.505	277.252	1.108.616	126.336	254.937
Kota Denpasar	95.443	184.215	1.702.645	139.373	700.163	32.906	747.915	436.687	1.256.461	1.136.541	1.623.308
Provinsi Bali	3.634.974	5.076.836	6.864.894	3.989.976	6.190.356	2.338.595	6.390.345	4.222.832	6.598.711	6.450.848	11.965.581

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa tingkat realisasi investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) selama rentang tahun 2013-2023 masih mengalami ketimpangan, dimana tingkat realisasi investor asing masih sangat tinggi di Kabupaten Badung dengan rata-rata tingkat realisasinya selama tahun 2013-2023 adalah sebesar Rp2.900.682,181. Sedangkan sangat rendah untuk wilayah Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. Khususnya di wilayah kabupaten Jembrana yang pada tahun 2015 dan 2018 memiliki realisasi investasi asing sebesar Rp0, kabupaten Gianyar pada tahun 2016 nilai realisasi asingnya sebesar Rp0, dan kabupaten Bangli yang pada tahun 2015-2018 memiliki tingkat realisasi investasi asing sebesar Rp0. Ketimpangan nilai realisasi investasi asing tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan realisasi investasi asing tersebut, hal ini bisa dilakukan dengan cara pengoptimalan belanja modal pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan tepat sasaran, serta melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah proses perizinan dan memastikan peraturan yang konsisten untuk meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 2. Realisasi PMDN di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota pada Tahun 2013-2023 (Dalam Juta Rupiah)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	80.267	215.646	191.799	4.652.613	274.569	4.409.436	269.267	142.332	173.492	201.730	486.632
Kab. Tabanan	108.928	98.540	178.116	4.397.145	60.697	140.651	25.725	758.200	1.035.195	194.247	162.769
Kab. Badung	3.126.279	1.658.995	2.967.016	517.536	1.011.839	352.413	5.150.896	3.558.447	2.514.694	3.170.567	2.739.222
Kab. Gianyar	1.134.498	430.417	1.065.721	810.558	525	392.379	306.116	145.776	871.301	295.323	293.607
Kab. Klungkung	23.954	65.372	118.145	409.229	2.881.329	50.579	22.563	42.420	66.996	106.496	20.451
Kab. Bangli	21.252	23.128	30.780	15.652	26.451	82.586	2.239	23.055	31.854	20.970	67.117
Kab. Karangasem	163.429	78.406	92.344	1.015.270	223.119	5.064.811	11.724	78.045	142.373	161.417	201.212
Kab. Buleleng	201.727	259.707	337.596	212.579	1.122.983	695.011	301.796	361.332	552.240	322.338	343.714
Kota Denpasar	2.932.781	1.016.228	14.026.153	27.058	5.666.227	5.105.668	1.302.846	323.068	967.105	1.529.016	2.636.062
Provinsi Bali	7.793.114	3.846.438	19.007.670	12.057.640	11.267.739	16.293.534	7.393.172	5.432.674	6.355.249	6.002.103	6.950.785

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Bali masih sama seperti PMA yakni mengalami ketimpangan. Nilai realisasinya sendiri masih tinggi untuk kabupaten Badung yakni dengan rata-rata Rp2.433.445,82 dalam rentang tahun 2013-2023. Untuk wilayah Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem sendiri tingkat realisasi

PMDN nya masih rendah hampir sama dengan PMA. Namun, untuk realisasi PMDN nya termasuk sudah baik walaupun masih terjadi ketimpangan. Hal ini bisa dilihat dari rentang tahun 2013-2023 nilai realisasi PMDN nya tidak ada yang bernilai Rp0, jadi untuk realisasi investasi dalam negerinya yang lebih perlu diperhatikan adalah sebaran nilai realisasinya agar lebih merata. Ketimpangan realisasi PMA dan PMDN ini menjadi faktor penghambat peningkatan nilai PDRB yang menjadi tanda terhambatnya pertumbuhan ekonomi, karena investasi atau penanaman modal merupakan penggerak dari perekonomian yang mencerminkan tingkat investasi di suatu daerah, sedangkan investasi yang kecil menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi (Bernhard Peter Nabut & Romulo Sinabuntar, 2021). Oleh karena itu, pemerintah harus dapat meningkatkan minat pihak-pihak swasta untuk melakukan investasi di wilayah-wilayah yang tingkat investasinya masih rendah, khususnya melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah terkait secara merata. Disinilah pemerintah perlu memanfaatkan APBD dengan baik. Pengeluaran pemerintah menurut Mangkoesubroto (2001) adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ketimpangan tidak hanya terjadi di realisasi investasi namun juga terjadi pada alokasi APBD serta pengeluaran pemerintahnya di wilayah Provinsi Bali. Hal ini bisa dilihat dari data penerimaan APBD di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2019 – 2022 berikut ini.

Tabel 3. Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2023 (Dalam Ribu Rupiah)

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab.	745.334	823.352	903.622	1.090.62	1.186.84	1.096.49	1.144.97	1.089.67	1.067.22	1.095.69	1.029.26
Jembrana	993	410	270	5.089	3.211	8.631	4.583	3.620	4.614	1.566	8.010
Kab.	1.253.02	1.367.07	1.615.93	1.794.60	1.871.86	1.862.27	1.926.61	1.789.66	1.794.17	1.784.23	1.940.17
Tuban	6.819	8.412	3.308	1.450	4.103	7.204	5.593	9.930	8.975	4.201	1.518
Kab.	2.954.66	3.459.98	3.735.12	4.328.11	4.939.38	5.420.00	5.792.96	3.906.15	2.916.46	4.609.69	6.060.46
Badung	2.971	6.016	9.565	5.840	6.134	9.298	7.591	7.464	0.089	7.096	8.111
Kab.	1.248.41	1.400.91	1.527.79	1.682.77	1.808.81	2.002.64	2.307.61	1.884.73	1.569.94	2.093.01	2.473.96
Gianyar	5.648	3.781	7.536	8.978	4.501	6.874	7.711	6.534	8.579	0.626	1.785
Kab.	711.405	827.028	907.139	1.062.21	1.098.93	1.100.13	1.215.58	1.104.88	1.146.02	1.147.88	1.207.83
Klungkung	235	807	632	8.238	8.729	8.936	9.170	4.193	3.938	1.201	6.791
Kab.	702.229	793.647	873.469	1.040.30	1.093.25	1.106.09	1.180.01	1.012.11	1.150.28	1.105.44	1.287.10
Bangli	030	679	027	3.804	4.800	7.725	2.548	1.114	3.516	0.500	5.473
Kab.	1.041.57	1.248.39	1.367.57	1.794.60	1.525.84	1.482.94	1.648.39	1.475.50	1.555.80	1.577.41	1.548.85
an	7.611	2.023	7.564	1.450	6.347	9.917	0.692	3.925	8.558	0.439	2.521
Kab.	1.390.65	1.543.58	1.937.77	2.066.17	2.200.11	2.052.83	2.318.75	2.003.21	2.083.21	2.078.95	2.210.76
Buleleng	7.293	4.631	1.345	3.156	3.190	6.001	8.511	9.088	4.717	2.626	2.502
Kota	1.547.60	1.727.96	1.786.40	1.943.17	2.058.13	2.121.04	2.193.53	1.964.05	1.855.18	2.106.39	2.129.09
Denpasar	5.213	8.713	0.782	2.688	6.261	0.458	0.988	4.093	6.441	7.942	9.782
Provinsi	4.109.37	4.577.67	4.967.93	5.249.01	5.992.16	6.259.36	6.645.53	5.718.33	5.923.15	5.885.77	6.933.94
Bali	7.805	8.391	5.151	7.754	1.668	7.608	8.873	9.699	3.294	8.601	7.319

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa penerimaan serta belanja daerah di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali masih mengalami ketimpangan sama seperti realisasi investasinya. Penerimaan APBD sangat tinggi di wilayah Kabupaten Badung dengan rata-rata penerimaan APBD nya berada di angka Rp1.235.147.796,363 dalam rentang tahun 2013-2023. Wilayah-wilayah seperti Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli untuk penerimaan APBD nya masih sangat rendah dimana rata-rata penerimaan APBDnya masih berkisar di 1-2 triliun rupiah. Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan ini terjadi, diantaranya seperti faktor geografis serta keunggulan dari masing-masing wilayah tersebut. Jika penerimaan anggarannya rendah otomatis akan menyebabkan pengeluaran pemerintah atau belanja daerahnya pun rendah, hal ini dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur serta porsi belanja operasi terutama belanja modal di daerah tersebut yang kurang. Belanja operasi adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk

belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan, porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah yang berujung pada meningkatnya nilai PDRB (Jacklien Elfiani Sendow et al., 2021).

Kedua faktor ekonomi tersebut baik investasi dan pengeluaran pemerintah mau sebarannya merata atau tidak peningkatan nilai PDRB tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya campur tangan manusia atau yang biasa kita sebut dengan tenaga kerja didalam aktivitas ekonomi. (Michael P. Todaro, 2006) dalam teori neo klasik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan beberapa aspek utama yakni sumber daya alam (modal), tenaga kerja, dan teknologi. Jika dalam suatu angkatan kerja memiliki jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, maka hal ini juga harus di dukung dengan penyediaan lapangan kerja yang luas, karena dengan meningkatnya angkatan kerja yang tidak diikuti oleh penyediaan lapangan kerja yang besar, maka ini juga dapat menyebabkan tingkat pengangguran didalam masyarakat menjadi meningkat. Terkait hal itu pengaruh tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan nilai *output* suatu daerah, karena jika sebaran investasi dan pengeluaran pemerintahnya sudah baik tetapi didalam wilayah tersebut tidak ada tenaga kerja yang mendukung. Keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang bisa dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (Shari & Abubakar, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sebelumnya terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2013–2023 memiliki urgensi yang tinggi. Studi semacam ini penting untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi regional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Investasi, baik domestik maupun asing, berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Pengeluaran pemerintah, khususnya dalam bentuk belanja modal, dapat memperkuat infrastruktur dan layanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, PDRB tahun sebelumnya seringkali menjadi indikator penting dalam memprediksi kinerja ekonomi di tahun berikutnya, mengingat adanya efek berkelanjutan dari pertumbuhan ekonomi. Dengan menganalisis hubungan antara variabel-variabel ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Tahun Lalu Terhadap Produk Domestik Bruto Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.”

Kajian Pustaka

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi (BPS, 2025). Menurut (Tarigan, 2010) PDRB adalah jumlah barang yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah selama satu periode dimana jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan uang atas dasar harga pasar yang sedang berjalan.

Investasi

Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Banyak ahli ekonomi yang berkata bahwa pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya investasi. Investasi juga dapat disebut sebagai pengeluaran perusahaan guna pembelian barang modal serta perlengkapan produksi. Harrod-Domar dalam teori tabungan dan investasi menjelaskan bahwa kegiatan investasi dianggap salah satu faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat (Novita Nurul Ain, 2021). Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat, dalam hal ini jumlah pengangguran akan turun sehingga angka kemiskinan pun akan ikut turun. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wagner's law, sesungguhnya perkembangan perekonomian yang memuat hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan lainnya yang membuat perekonomian menjadi lebih kompleks, akan mendorong peran pemerintah yang lebih besar dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Keynes dalam teorinya menyebutkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan kebijakan fiskal baik melalui penerimaan pemerintah yang berupa pajak (*tax*) maupun melalui pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Dampak kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya ditandai dengan angka pengganda pengeluaran, yaitu angka yang menunjukkan besarnya kelipatan pertambahan output nasional jika terjadi penambahan pengeluaran investasi atau pengeluaran pemerintah. Angka pengganda itulah yang memberi sinyal adanya dampak kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap pertumbuhan ekonomi (Iis Surgawati, 2020).

Produk Domestik Regional Bruto Tahun Lalu

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa model yang menjelaskan bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sebelumnya mempengaruhi PDRB tahun berikutnya dalam jangka panjang. Salah satunya adalah model pertumbuhan Harrod-Domar, yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Model ini menekankan bahwa investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi juga kapasitas produksi dan penawaran agregat dalam jangka panjang. Dengan kata lain, tingkat investasi pada suatu periode akan menentukan pertumbuhan output di periode berikutnya, sehingga PDRB tahun sebelumnya berperan penting dalam menentukan PDRB tahun berikutnya (R. Putra, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, pdrb tahun lalu terhadap PDRB kabupaten/kota di Proivinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross-section*. Data diambil melalui BPS dari 1 kota dan 8 kabupaten di Provinsi Bali yang merupakan unti *cross- section* dan data *time series* dari periode 2013-2023 (11 tahun). Metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistic deskriptif dan analisis regresi data panel dinamis *autoregressive* dengan bantuan alat olah data yaitu *SPSS*.

HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	Y_{t-1}
Mean	2154656,49	644676,23	1034344,69	1824889199,8	2170510,102
Minimum	55290	0	525	702229030	55290
Maximum	6839756	6587903	14026153	6060468111	6839756
Std.Deviasi	1627101,404	1163688,52	1921588,327	1060901605,8	1627763,3434
N	99	99	99	99	98

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Tabel 4 mendeskripsikan jumlah pengamatan pada penelitian ini sebanyak 99 pengamtan dengan rentang tahun 2013-2023. Hasil analisis statistik deskriptif seluruh pengamatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4 menunjukkan bahwa investasi asing memiliki nilai minimum sebesar Rp0 dan nilai maksimum sebesar Rp6.587.903. Dengan rata-rata Rp644.676,23 dan standar deviasi Rp1.163.688,52. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4 menunjukkan bahwa investasi dalam negeri memiliki nilai minimum sebesar Rp525 dan nilai maksimum sebesar Rp14.026.153. Dengan rata-rata Rp1.034.344,69 dan standar deviasi Rp1.921.588,327. Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah memiliki nilai minimum sebesar Rp702.229.030 dan nilai maksimum sebesar Rp6.060.468.111. Dengan rata-rata Rp1.824.889.199,8 dan standar deviasi Rp1.060.901.605,8. Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat Lag PDRB memiliki nilai minimum sebesar Rp55.290 dan nilai maksimum sebesar Rp6.839.756. Dengan rata-rata Rp2.170.510,102 dan standar deviasi Rp1.627.763,3434.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Data Panel Dinamis (*Autoregressive*)

Model	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Signifikansi
Y	-606678,081	187929,698	-3,228	0,002
X ₁	-0,657	0,095	-6,937	0,000
X ₂	0,163	0,049	3,344	0,001
X ₃	0,001	0,000	10,789	0,000
Y _{t-1}	0,254	0,095	3,890	0,000

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan hasil regresi tabel 4.7, maka didapatkan hasil persamaan model regresi dinamis antara variabel dependen (PDRB) dan variabel independent (investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan lag PDRB) sebagai berikut: $Y_t = -606678,081 - 0657X_{1t} + 0,163X_{2t} + 0,001X_{3t} + 0,254Y_{t-1}$ Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel investasi asing (X₁), investasi dalam negeri (X₂), pengeluaran pemerintah (X₃), dan

nilai PDRB tahun sebelumnya (Y_{t-1}) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji simultan yang menunjukkan $F_{hitung} 70,089 > 2,70$ dengan probabilitas $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_1 diterima sehingga hal ini mengindikasikan bahwa variabel investasi (asing dan dalam negeri), pengeluaran pemerintah, dan nilai PDRB tahun lalu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-t yang diperoleh adalah nilai t_{hitung} sebesar $-6,937 < 1,661$ dan nilai $0,000 > 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya variabel investasi asing (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Koefisien investasi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa kurangnya pemerataan tingkat investasi di setiap wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dimana, di beberapa daerah yang memiliki nilai investasi yang baik maka nilai investasi asing tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Yang dimana, menurut pendapat dari (Sukirno, 2000) dimana ia berpendapat bahwa investasi yang pada hakikatnya mengatakan bahwa perubahan dalam tingkat investasi adalah sepenuhnya ditentukan oleh perubahan dalam tingkat pendapatan nasional atau regional.

Secara parsial investasi dalam negeri (X_2) memperoleh bahwa nilai-t yang diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,344 < 1,661$ dan nilai probabilitas $0,001 < 0,05$ maka H_0 diterima, yang artinya variabel investasi dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Koefisien dari investasi dalam negeri bernilai positif yang mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan nilai investasi dalam negeri sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai PDRB sebesar 3,344% dalam waktu 1 tahun. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Hakim & Kumalasari, 2020) yang menemukan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan sesuai dengan hasil penelitian dari Sinta Regina Trisnu & Purbadharmaja (2014) yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Bali. Secara parsial pengeluaran pemerintah (X_3) memperoleh bahwa nilai-t yang diperoleh adalah nilai t_{hitung} sebesar $10,789 > 1,661$ dan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah (X_3) sebesar 10,789 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan jika tingkat pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1% maka nilai PDRB akan mengalami peningkatan sebesar 10,789% dalam jangka waktu satu tahun. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Secara parsial pdrb tahun lalu ($LagY_{t-1}$) memperoleh bahwa nilai-t yang diperoleh adalah nilai nilai t_{hitung} sebesar $3,890 > 1,661$ dan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Berarti nilai PDRB tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB tahun ini atau secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Nilai koefisien dari PDRB tahun sebelumnya (Y_{t-1}) bernilai sebesar 0,413 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan jika PDRB tahun lalu meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,413% dalam jangka waktu satu tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri Romhadhoni et al., 2018) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

KESIMPULAN

Investasi (asing dan dalam negeri), pengeluaran pemerintah, dan nilai PDRB tahun lalu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2013-2023. Secara parsial investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan, investasi dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, dan produk domestik bruto tahun lalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2013-2023. Bagi pemerintah, Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Bali harus lebih peka terhadap potensi dari wilayahnya masing-masing sehingga pengeluaran pemerintah yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan dan meminimalkan nilai disparitas PDRB di setiap wilayah. Dari segi investasi asing, pemerintah perlu memperhatikan wilayah-wilayah yang memiliki nilai realisasi investasi khususnya investasi asing yang masih kecil seperti wilayah kabupaten Jembarana yang pada tahun 2015 dan 2018 yang memiliki nilai realisasi investasi asing sebesar 0. Serta kabupaten Bangli yang pada tahun 2015-2018 memiliki nilai realisasi investasi asing 0, oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan sektor-sektor tersebut agar memiliki nilai realisasi investasi asing yang merata. Pengeluaran pemerintah yang efektif dan tepat sasaran dapat dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, dapat meningkatkan daya tarik bagi investor asing. Infrastruktur yang memadai mempermudah distribusi barang dan jasa serta mengurangi biaya operasional perusahaan, sehingga meningkatkan minat investasi asing. Selain pengeluaran langsung, pemerintah dapat meningkatkan realisasi investasi asing dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan kepastian hukum. Reformasi birokrasi untuk mempermudah proses perizinan dan memastikan peraturan yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas kebijakan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. A., & Andiny, P. (2022). Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa Teknologi*, 6(1), 1-18.
- Amalina Maharani, & Farhan Saputra. (2021). Relationship of Investment Motivation, Investment Knowledge and Minimum Capital to Investment Interest. *Journal Of Law Politics And Humanities*, 2(1), 23-24.
- Ambok Pangiuk. (2017). Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Studi Tahun 2012-2015). *Ltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 1(1), 16-17.
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i2.139>
- Asfia Murni. (2016). *Ekonomika Makro* (Edisi Revisi). Refika Aditama.
- Bernhard Peter Nabut, & Romulo Sinabuntar. (2021). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(3), 1571- 1572.
- BPS. (2025). *Buku Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2020-2022*.
- BPS. (2025). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. BPS.



- Budi Prayitno, & Renta Yustie. (2020). Pengaruh Tenaga Kerja, Ipm Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota Di Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(1), 47–53.
- Bunyanun Marsus, Ni Kadek Indriani, Visal Darmawan, & Amiruddin Akbar Fisru. (2020). *Pengaruh Panjang Infrastruktur Jalan Terhadap Pdrb Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo*.
- Cok Istri Sinta Regina Trisnu, & Ida Bagus Putu Purbadharmaja. (2014). Pengaruh Pmdn Dan Pma Terhadap Pdrb Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3(3), 88–95.
- Dwi Kartikasari. (2017). The Effect of Export, Import and Investment to Economic Growth of Riau Islands Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 663– 667.
- Dwiningwarni, S. S. (2017). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 15(4).
- Herman Kambono, & Elyzabet Indrawati Marpaung. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.*, 12(1), 138–139.
- Hernimas Nauffalia Husna, Lorentino Togar Laut, & Panji Kusuma Prasetyanto. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Provinsi Banten Tahun 2004-2018. *Dinamic : Directory Journal Of Economic*, 20(2), 318–334.
- Hooi Hooi Lean, & Bee Wah Tan. (2011). Linkages Between Foreign Direct Investment And Economic Growth In Malaysia. *Journal Of Economic Cooperation And Development*, 32(4), 75–96.
- Iqbal Firman Alamsyah, Rut Esra, Salwa Awalia, & Darnah Adi Nohe. (2022). Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 2, 254–266.
- Lainus Gwijangge, George M.V Kawung, & Hanli Siwu. (2018). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(6), 45–55.
- Leni Lestari, I. N. M. Y. (2023). Pengaruh Investasi, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 1140–1141.
- Lucky Riana Putri. (2020). Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan
- Magdalena, S., & Suhatman, R. (2020). The Effect Of Government Expenditures, Domestic Investment, Foreign Investment To The Economic Growth Of Primary Sector In Central Kalimantan. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 3(3), 1692–1703. <https://doi.org/10.33258/Birci.V3i3.1101>
- Maisaroh, M., & Risyanto, H. (2018). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Provinsi Banten. *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 206. <https://doi.org/10.14421/Ekbis.2017.1.2.1049>
- Michael P. Todaro. (2006). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (4th Ed., Vol. 2). Erlangga.
- Muhammed Akpai Amade, Isyaku Mohammed, Eniola Victoria Ibisani, Ayobami Temitope Owolabi, & Udi Joshua. (2022). Interaction Between Domestic Investment, Foreign Direct Investment And Economic Growth In Nigeria. *Journal Academic Review of*

- Economics and Administrative Sciences*, 15(2), 261– 275.
- N. Gregory Mankiw. (2003). *Macroeconomics* (5th ed.). Worth Publisher.
- Nguyen, K. T., & Nguyen, H. T. (2021). The Impact of Investments on Economic Growth: Evidence from Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(8), 345– 353.
- Onifade, S. T., Çevik, S., Erdoğan, S., Asongu, S., & Bekun, F. V. (2020). An empirical retrospect of the impacts of government expenditures on economic growth: new evidence from the Nigerian economy. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-0186-7>
- P. Eko PRASETYO. (2020). The Role of Government Expenditure and Investment for MSME Growth: Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 472–473.
- Pdrb Kota Surakarta. *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 21(1), 43–49.
- Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(1), 196–204. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v4i1.997>
- Puspasari Windy Astuti. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Putri Romhadhoni, Dita Zamrotul Faizah, & Nada Afifah. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 115–121.
- Rendy Alvaro. (2021). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Serta Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi . *Jurnal Budget*, 6(1), 114–131.
- Rizaldi Kaharudin, Anderson G. Kumenaung, & Audie O. Niode. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Current Archives About*, 19(04), 13–23.
- Sadono Sukirno. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dariklasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka.
- Setianingsih, L., & Widyastuti, E. (2020). Does Sukuk, Domestic Investment, Foreign Investment, And Inflation Contribute To Economic Growth In Indonesia? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2375. <https://doi.org/10.20473/Vol7iss202012pp2375-2384>
- Shari, R. M., & Abubakar, J. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Angka Partisipasi Sekolah Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 5 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(2), 20. <https://doi.org/10.29103/Jeru.V5i2.8310>
- Surgawati, I. (2020). Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Hipotesis Keynes Versus Teori Wagner. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.37058/Wlfr.V1i1.1474>
- Syafitri, A., & Ariusni, A. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 351. <https://doi.org/10.24036/jkep.V1i2.6177>
- Tarigan, R. (2010). *Ekonomi Regional: Teori Dan Aplikasi*. Pt. Bumi Aksara.
- Valencia Putri, & Kaylla Manisha. (2021). Analisis Minat Penanaman Modal Dalam Negri



- Dan Penanaman Modalasing Diindonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 710-711.
- Winarni, E., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 447. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V20i2.946>
- Yunita, M., & Sentosa, S. U. (2019). Pengaruh Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 533. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6265>